

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Atmosudirjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan X, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Abdullah, Rozali, 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Azhary, Thahir, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.

....., 1995, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press.

Basah, Sjachran, 1989, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Jakarta: Rajawali Pers.

H.R, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hartono, Sunaryati, 1976, *The Rule Of Law*, Bandung: Alumni.

Harahap Zairin, 1997, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

....., 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

....., 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Herlinda, Erna, 2004, *Tinjauan Tentang Gugatan Class Actions Dan Legal standing Di Peradilan Tata Usaha Negara*, e-USU Repository © 2004, Universitas Sumatera utara.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

....., 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan.

-, 2005, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kupita, Weda, 2010, *Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Marbun, S.F., 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty.
-, 2002, *Demensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: U.I.I Pers.
-, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- M Hadjon, Philipus dkk, 1995, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Ridwan, Juniarso dkk, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1988, *Metode Penulisan dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indah.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W. Riawan, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wijoyo, Suparto, 2005, *Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Wiyono, R, 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)

Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 1).

Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 10).

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 26).

Putusan Pengadilan:

Putusan PTUN Palembang Nomor : 10/G/2015/PTUN-PLG.

Sumber Lain dan Internet

<https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/25/citizen-law-suit>, diakses pada 10 April 2017.